



BULETIN PARLEMENTARIA

NOMOR 952/IV/III/2017 • MARET 2017



PUSAT RISET PANAS BUMI PERLU DIMAKSIMALKAN

5 Pimpinan DPR RI Tinjau
Pusat Data
Informasi Indosat

9 Baleg Bentuk
Panja RUU Penyiaran

GRATIS
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Pusat Riset Panas Bumi Perlu Dimaksimalkan

Energi panas bumi (geothermal) adalah salah satu energi terbarukan yang potensinya amat besar di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, DPR RI menggelar rapat konsultasi dengan Kemenristekdikti, Kementerian Pan-RB, Kementerian ESDM, Kementerian Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas, Menteri Keuangan, dan Presiden Direktur PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) guna membahas pembentukan Pusat Riset Panas Bumi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/03).

“ Kita ketahui bahwa potensi panas bumi kita cukup tinggi, yakni hampir 30 Giga Watt. Sementara yang baru dimanfaatkan sebesar 1500 Mega Watt, berarti baru hanya sebesar 5 persen nya. Karena hal ini harus didahului dengan riset, maka kita sudah tetapkan badan mana yang harus melakukan riset dan sumber pendanaan-nya,” ucap Agus Hermanto.

Ia menjelaskan, saat ini yang menjadi sumber keuangannya sudah siap, yaitu dari *World Bank* dan dari SMI. Namun memang masih mengalami keterlambatan, namun hari ini telah dihasilkan suatu keputusan yang mendorong agar secepatnya bisa dilakukan riset mengenai *geothermal* tersebut.

"Dengan demikian kita dapat mengurangi ketergantungan kita kepada migas. Seperti kita ketahui ketergantungan terhadap fosil cukup tinggi, oleh karenanya perlu ada langkah untuk mengantisipasinya, yakni dengan menggunakan energi *geothermal* dengan semaksimal mungkin," ujarnya.

Saat ini masih 5 persen, kalau bisa ditingkatkan hingga 15 atau 20 persen mungkin listrik kita tidak akan gampang padam. Dana-dana yang ada juga bisa terserap.

"Dana yang ada tersebut bukanlah



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Agus Hermanto

dana APBN, melainkan dana hibah dari negara-negara maju yang bersedia memberikan anggarannya untuk menjaga masalah lingkungan. Amat disayangkan bila dana hibah itu tidak secepatnya kita dorong untuk digunakan, padahal kita membutuhkan energi *geothermal* secepatnya," paparnya.

Agus menjelaskan bahwa setelah dilaksanakan riset tentang *geothermal* itu, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengeboran, agar kita dapat meng-

eksplorasi energi panas bumi yang dapat digunakan untuk menghidupkan turbin-turbin listrik.

"Kalau listrik kita mencukupi maka hal itu merupakan perjalanan diambang kemakmuran, dan bila energi kita tercukupi maka semua sektor juga akan bergerak. Untuk meminimalisir kesalahan penentuan titik-titik pengeboran tersebut, kita telah menginventarisir badan riset handal yang kita miliki untuk menghasilkan riset yang terbaik. ■

(dep.mp/fotoancari/hr)





Ketua DPR RI Apresiasi Kinerja Pemerintah

Ketua DPR RI Setya Novanto mengapresiasi capaian kinerja pemerintahan Jokowi-JK, namun demikian hal itu perlu untuk ditingkatkan lagi agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keinginan pemerintah dapat tercapai. Hal itu diungkapkan usai melakukan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Fraksi DPR RI pada Senin, (20/03). Dalam rapat tersebut, beberapa isu dibahas seperti pertumbuhan ekonomi dan redistribusi aset serta reforma agraria.

“ Ini kita barusan rapat dengan seluruh pimpinan fraksi dan juga lembaga. Tujuannya adalah kita menyampaikan hasil rapat pimpinan tinggi negara bersama presiden. Kita sampaikan yang terkait masalah pertumbuhan ekonomi dan kedua masalah redistribusi aset dan reforma agraria,” terang Setya Novanto.

Novanto menuturkan, dalam pertemuan tersebut semua pimpinan fraksi memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah tetapi perlu ada tindakan implementasi supaya rencana pemerintah dapat terlaksana sesuai keinginan.

“Tentu ini menjadi pembicaraan dan juga evaluasi bersama. Karena apa yang direncanakan pemerintah melalui Presiden Jokowi-JK yaitu kita semua pimpinan fraksi memberikan apresiasi tapi perlu ada tindakan implementasi supaya betul-betul terlaksana apa yang menjadi keinginan pemerintah. Dan bisa diterima oleh rakyat,” jelas Novanto.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyampaikan bahwa DPR RI akan mengundang menteri-menteri terkait,



Ketua DPR RI, Setya Novanto

seperti Menteri BPN, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri dan lain-lain untuk peningkatan capaian kerja pemerintah. Hal itu agar target pembangunan dapat segera dicapai.

“Sehingga dalam waktu dekat usul dari semua pimpinan fraksi, kita akan undang para menteri-menteri terkait untuk bisa menyampaikan secara jelas sehingga ini bisa memberikan gambaran jelas. Sehingga apa yang diinginkan pemerintah bisa tercapai,” tutup Novanto. ■

(hs/sc) foto: Arief/hr.

PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Mastur Prantono, Suciati, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI

Bagus Mudjiharjanto

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,

Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar,

Surahmat Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha,

Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman,

R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadillah

ADMINISTRASI FOTO

Hasri Mentari

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN

Pimpinan Penerbitan

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

Penanggung Jawab Produksi

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

Staf Produksi

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi S. Kom

Penanggung Jawab Distribusi dan Sirkulasi

Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

Koordinator

Mujiono

Staf Distribusi dan Sirkulasi

Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita, Ifan, Siti Rondiyah, Oji

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Pemerintah Jangan Cederai Rasa Keadilan Masyarakat Kendeng

Aksi cor kaki jilid kedua di depan Istana Merdeka yang dilakukan oleh sejumlah petani dari Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, sejak Selasa (14/03) lalu, mendapat perhatian Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon. Fadli menilai, sikap Pemerintah telah mencederai rasa keadilan masyarakat Kendeng.

“ Saya mengikuti aksi yang dilakukan oleh para petani Pegunungan Kendeng. Dan saya menyayangkan pernyataan Menteri BUMN yang menyatakan bahwa Presiden akan segera meresmikan pabrik semen di Rembang pada bulan April mendatang. Menurut saya pemerintah telah mencederai rasa keadilan masyarakat Kendeng,” tegas Fadli dalam rilisnya kepada Parleментарia, Senin (20/03).

Sebagaimana diketahui, aksi yang dilakukan oleh warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) merupakan bentuk protes

atas pendirian pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut izin PT Semen Indonesia dan memastikan tak ada pabrik atau tambang semen di Pegunungan Kendeng.

“Sewaktu aksi cor kaki pertama kali dilakukan pada April 2016 lalu, yang kemudian berujung pada undangan ke Istana tanggal 2 Agustus 2016, Presiden sudah memutuskan untuk menghentikan operasi pabrik semen hingga selesainya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh tim independen. Kajian itu diperkirakan akan selesai dalam tempo satu tahun. Itu keputusan yang positif, mengingat masih berperkara dengan pihak PT Semen Indonesia,” papar Fadli.

Namun dalam perjalanannya, jelas politisi F-Gerindra itu, hasil KLHS ternyata bisa selesai April 2017 mendatang. Sehingga tidak sampai setahun, kajian sudah bisa diselesaikan. Tapi anehnya, sementara hasil KLHS-nya saja belum keluar, Menteri BUMN seperti sudah tahu hasilnya dengan menyatakan bahwa bulan depan Presiden akan segera meresmikan pabrik semen di Rembang. Hal ini dikhawatirkan bisa memancing ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

“Apalagi, pada 5 Oktober 2016 lalu, lewat putusan Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk memenangkan petani Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), yang sekaligus membatalkan izin lingkungan pabrik semen di Rembang. Pernyataan Menteri BUMN itu telah menyakiti rasa keadilan masyarakat Kendeng dan bisa dianggap mem-fait accompli



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Fadli Zon

keputusan Presiden sebelumnya,” nilai Fadli.

Untuk itu, ia meminta Presiden agar berhati-hati mengambil keputusan. Asas kepastian hukum jangan di rusak dengan mengambil keputusan-keputusan yang tidak sinkron satu sama lain, apalagi yang bersifat melawan hukum. Hak hukum dan hak sosial masyarakat yang melakukan gugatan harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai hukum yang berlaku di Tanah Air bertolak belakang dengan keadilan.

Ia pun meminta ke depannya, agar setiap bentuk investasi tidak boleh lagi menyalahi prosedur dan tata aturan, karena akan menimbulkan kontroversi dan konflik di masyarakat. Kasus gagalnya pembangunan pabrik semen di Pati tempo hari, di mana semua gugatan hukum berhasil dimenangkan oleh masyarakat, dan kontroversi izin pabrik semen di Rembang, yang pada akhirnya juga gugatan hukumnya dimenangkan oleh masyarakat, harusnya memberi pemerintah pelajaran agar tidak menerbitkan kebijakan sekehendak hati.

“Pemerintah tidak boleh 'investor minded' dan menyepelekan suara serta hak-hak masyarakat dalam proses pembangunan. Aksi cor kaki adalah bentuk frustrasi, karena masyarakat tidak tahu lagi bagaimana caranya menarik perhatian pemerintah. Jangan sampai pemerintah buta dan tuli dengan mengabaikan suara dan hak masyarakat petani Kendeng atas nama pembangunan,” kritisi politisi asal dapil Jawa Barat itu. ■ (sf/foto:azka/hr)



<https://tirto.id/hari-ketiga-aksi-cor-kaki-petani-kendeng-ckQj>

Pimpinan DPR RI Tinjau Pusat Data Informasi Indosat

Saat ini kita tidak bisa menghindari perubahan, dimana perkembangan perangkat teknologi baru dunia menyebabkan cara manusia berinteraksi ikut berubah. Oleh karenanya DPR RI tidak bisa lagi mengandalkan pola-pola komunikasi dengan masyarakat secara tradisional.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah saat berkunjung ke Sarana *Digital Engagement Center* di Gedung Indosat, Jakarta, Senin (20/03).

"DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat dan ditugaskan untuk mendengar aspirasi masyarakat harus memodernkan dirinya, supaya dapat lebih cepat merespon apa yang menjadi persoalan-persoalan masyarakat. Kita ingin mempelajari hal itu dari Indosat, yang sudah lebih dahulu mengimplementasikannya," ucap Fahri.

Ia mengatakan, memang tidak bisa mengganti salaman dan silaturahmi dengan cara digital, tetapi menyangkut aspirasi dan percakapan masyarakat, terutama

kelompok kelas menengah, kaum muda, dan sebagainya, bisa ditangkap melalui digitalisasi sistem informasi di DPR RI.

"Ini salah satu aspek dari keseluruhan rencana DPR RI untuk membangun parlemen yang modern dan berbasis kepada IT dan sistem digital. Itulah sebabnya kita datang ke Indosat, karena Indosat adalah salah satu perusahaan seluler yang paling tua di Indonesia, dan merupakan perintis yang telah banyak mengalami pengalaman internal," ujarnya.

Ada satu pengalaman yang ingin dicontoh, lanjut Pimpinan DPR RI Korkesra ini, yaitu bagaimana menerapkan digital *lifestyle* dan juga sistemnya kepada crew dan anggotanya. Serta mendidik masyarakat tentang bagaimana *living with digital Era*.

"Ada tahapan berikutnya yang harus kita lakukan, sebab digital era ini juga perlu penyuluhan. Itu dikarenakan saat ini semakin banyak hal yang hilang dari kita, dimana digambarkan seseorang saat di meja makan dengan keluarganya tetapi semua anggota keluarga sibuk dengan *Handphone*. Pada akhirnya, masyarakat harus kita tuntun agar menggunakan telpon genggam yang dimilikinya untuk melakukan penggunaan dan komunikasi yang lebih positif. ■

(dep.mp) foto:kresno/hr



Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah saat kunjungi Kantor Indosat

Hari Perempuan Internasional Agenda Pembangunan Global Tekankan Kesetaraan Gender

Ketua DPR RI, Setya Novanto menilai peringatan hari Perempuan Internasional yang sejatinya jatuh setiap tanggal 8 Maret ini sebagai sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan atas pencapaian kaum perempuan, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik. Hal tersebut diungkapkannya dalam sambutan sekaligus pembukaan acara *International Women's Day* di ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/03).

“ Sebagai bagian dari komunitas global, DPR RI dimotori oleh Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) turut memperingati hari Perempuan Internasional yang sejatinya jatuh setiap tanggal 8 maret, hal ini semata untuk mengapresiasi dan menghargai pencapaian kaum perempuan di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik,” ujar Novanto.

Peringatan hari perempuan Internasional tahun ini, lanjut Novanto, bertemakan *Women in the changing world of work: Planet 50 :50 by 2030* merefleksikan agenda pembangunan global yang menekankan pada pentingnya kesetaraan gender. Di tahun 2015 lalu, para pemimpin dunia dan komunitas global telah sepakat untuk mewujudkan kesetaraan gender pada tahun 2030 sebagai salah satu dari 17 tujuan

pembangunan (sustainable development Goals).

Salah satu target yang ingin dicapai adalah memastikan partisipasi perempuan secara penuh dan efektif serta memberikan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan perempuan di setiap tingkat pengambilan kebijakan, baik di bidang politik dan ekonomi maupun di dunia pekerjaan secara umum.

"DPR RI menyadari bahwa untuk mencapai kesetaraan gender, kita perlu meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. UU Nomor 8 tahun 2012 secara jelas memberikan mandat kepada partai politik yang akan mengikuti pemilu untuk menyertakan sekurang-kurangnya tiga puluh persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol di tingkat pusat dan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam daftar calon anggota legislatif," lanjut Politisi dari Fraksi Partai Golkar.

Isu keterwakilan perempuan ditambahkan Novanto juga tengah dibahas secara serius dalam revisi UU Pemilu tahun ini. Pihaknya meyakini bahwa dengan memberikan *affirmative action* kepada perempuan, akan lahir banyak perempuan tangguh di bidang politik dan kebijakan publik.

Pada kesempatan itu selain Ketua BKSAP DPR RI, Nurhayati Assegaf hadir beberapa pembicara perempuan, yakni Ida Fauziyah, Anggota Komisi I DPR RI, Annisa Larasati Pohan, pendiri yayasan Tunggal Dewi yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak, Siti Zuhro, Peneliti dari LIPI, Laksma TNI drg. Andriani, serta Johanna Brismar Skoog, Duta Besar dari Swedia. ■



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon didampingi Anggota Komisi II Sareh Wiryono dan Endro Hermono saat menerima perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Gedung DPR RI

DPR RI Akan Jembatani Nasib Perawat Honorar

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berjanji akan menjembatani masalah terkait nasib perawat honorar yang tak kunjung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia mendorong agar pemerintah segera melakukan penanggulangan yang sistematis terkait hal itu.



“ Kita sangat prihatin masih banyak tenaga honorer perawat. Mereka sudah bekerja belasan tahun tapi belum mendapat penghargaan layak, termasuk status mereka. Ini kami akan teruskan ke Presiden, Mendagri atau Menpan-RB, ” ujar Fadli didampingi Anggota Komisi II Sareh Wiryono dan Endro Hermono saat menerima sejumlah perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/03/2016).

Lebih lanjut, ia menyebutkan DPR RI akan terus memperjuangkan nasib para pekerja honorer, termasuk perawat sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan merevisi UU ASN yang telah menjadi RUU inisiatif DPR RI.

"Revisi UU ASN sudah dibahas di komisi terkait, kita harapkan pemerintah juga ikut mendukung. Tidak boleh ada yang tertinggal, kalau misalnya bidan dan guru sudah, maka perawat juga diangkat statusnya," jelas Fadli

"Perawat adalah yang menyediakan kebutuhan dasar bagi pasien dan mereka adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi seharusnya, ini tidak boleh terjadi, apalagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah," tandas politisi dari F-Gerindra itu.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PPNI Harif Fadhilah menyalahkan sikap pemerintah yang dianggap tidak adil terhadap perawat. Menurutnya, beberapa profesi lain seperti dokter ataupun bidan selalu ada pengangkatan menjadi PNS setiap tahunnya, namun tidak dengan perawat.

Ia menyebutkan masih ada 11.300 tenaga perawat honorer yang terdata di 15 provinsi. Ia melanjutkan, banyak dari mereka yang sudah bekerja belasan tahun di instansi Pemerintah, Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), namun tak juga diangkat menjadi PNS. ■

©innisj/foto : Ruar/ist



Kerjasama Sektor Migas Indonesia - Qatar Harus Ditingkatkan

Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto mendukung kerjasama bilateral antara Qatar dan Indonesia terutama didalam sektor ekonomi. Karena Qatar merupakan negara eksportir minyak dunia.

Dukungan tersebut disampaikan Agus saat memimpin Kunjungan Muhibah Delegasi Parlemen Indonesia ke Parlemen Qatar beberapa hari lalu. "Kunjungan ke Parlemen Qatar ini guna memenuhi undangan Duta Besar Negara Qatar untuk Indonesia," katanya.

Delegasi Parlemen Indonesia diterima langsung oleh Wakil Ketua Parlemen Qatar Isa Rabeah al-Kuwari. Saat pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Qatar, politisi Demokrat ini menyinggung masalah perlindungan tenaga kerja Indonesia, karena ini juga menjadi masalah di Indonesia.

"Saya berharap walaupun moratorium tapi pengiriman tenaga kerja kita terus berjalan, karena tenaga kerja formal sangat dibutuhkan di negara timur tengah khususnya Negara Qatar," harapnya.

Selain berkunjung ke Parlemen Qatar, delegasi Parlemen Indonesia juga berkunjung ke Kantor Pusat Ooredoo dan diterima langsung oleh CEO Ooredoo

Qatar Waleed Mohammad al Asayed.

Agus menyambut baik investasi Ooredoo di Indonesia yang sudah banyak menyerap tenaga kerja Indonesia. Namun Agus berharap investasi ini bukan di sektor telekomunikasi saja tetapi juga di sektor lain, seperti Ooredoo membina persepakbolaan di Indonesia.

Sementara itu, anggota delegasi Parlemen Indonesia Mukhlisin dari Fraksi PPP berharap Ooredoo dapat membantu sarana infrastuktur yang ada di Indonesia melalui dana CSR.

Masukkan tim delegasi DPR RI terkait dana CSR yang di peruntukkan untuk pembinaan sepakbola di Indonesia dan terkait ketenagakerjaan juga infrastruktur disambut dan direspon dengan baik oleh CEO Ooredoo.

Tim Delegasi kunjungan muhibah DPR RI antara lain Agus Hermanto F-PD, Hartanto Edhie Wibowo F-PD, Wahyu Sanjaya F-PD, Syamsul Luthfi F-PD, Zulfikar Achmad F-PD, Mukhlisin F-PPP, Nasril Bahar F-PAN, Siti Hediati Soeharto F-Golkar. ■

fhs/sc)Foto :Jaka/hr



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Agus Hermanto berdialog dengan delegasi Parlemen Qatar

KPK Ditantang Buka Pihak Yang Kembalikan Uang Kasus e-KTP



Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah menantang KPK untuk membuka ke publik terkait nama pihak yang telah mengembalikan uang terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Politisi PKS ini menilai hal itu perlu dilakukan mengingat dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah bocor ke publik. Demikian disampaikan Fahri Hamzah pada Rabu, (15/03) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah menantang KPK untuk membuka ke publik terkait nama pihak yang telah mengembalikan uang terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Politisi PKS ini menilai hal itu perlu dilakukan mengingat dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah bocor ke publik. Demikian disampaikan Fahri Hamzah pada Rabu, (15/03) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Sekarang saya mau nantang KPK, karena sudah membocorkan surat dakwaan dan BAP, sekarang tolong bocorkan semua nama yang terima uang dan mengembalikan uang," ujar Fahri.

Saya mau nantang KPK, karena sudah membocorkan surat dakwaan dan BAP, sekarang tolong bocorkan semua nama yang terima uang dan mengembalikan uang

Menurut Fahri, dengan tidak membuka nama-nama tersebut, KPK dianggap seolah melindungi pihak-pihak tertentu atau bermaksud menyerang orang-orang tertentu berdasarkan pesanan dari pihak yang tidak jelas. Ia pun menyinggung peran Ketua KPK Agus Rahardjo dalam kasus tersebut.

"Jangan lupa dia (Agus Rahardjo) kepala badan yang ditugaskan negara mempelajari setiap pengadaan barang dan jasa, setiap tender dan harus mengerti. Dan dia hadir di kantor Wapres, dipimpin Sofyan Djalil dan dia menyetujui tender dilanjutkan," ungkap Fahri.

Sebelumnya, sejumlah nama besar baik dari unsur legislatif maupun eksekutif disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Namun, merasa ada beberapa kejanggalan dalam pengusutan kasus tersebut, Fahri Hamzah melempar wacana hak angket ke publik.

Hak angket diusulkannya untuk menginvestigasi lebih dalam mengenai proses tender e-KTP pada pemerintahan periode lalu. Namun, usulan hak angket tersebut masih diwarnai perbedaan pendapat antar fraksi-fraksi di DPR RI. ■

(es)foto.andri/hr.



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah



Baleg Bentuk Panja RUU Penyiaran

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membentuk Panja Revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran. Diharapkan dalam tingkat Panja, pembahasan tidak terlalu lama agar segera di Paripurnakan untuk dibahas bersama Pemerintah.

“ Kita masih akan mendengar masukan dari penanggung jawab konten penyiaran atau KPI. Sebab, RUU ini penting bagi hajat orang hidup banyak sehingga semua harus terakomodasi di dalam peraturan perundang-undangan ini, ” jelas Wakil Ketua Baleg Dossy Iskandar di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (21/03) sore.

Lebih lanjut, politisi dari F-Hanura itu menuturkan pihaknya berharap pembahasan RUU penyiaran segera rampung. Ia juga menekankan agar konten penyiaran jangan sampai tumpang tindih dengan regulasi lainnya.

"Karena kita juga memikirkan tahun 2018 sudah memasuki tahun politik. Jangan sampai dibuka kebebasan berekspresi tetapi juga tidak memberikan pendidikan politik yang

baik," tuturnya.

Sisi lain, Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid mengatakan revisi UU Penyiaran mengatur konten iklan sebesar 30 persen. Angka tersebut masih dinilai sangat wajar, guna menciptakan iklim penyiaran yang sehat.

"Karena kalau TV nya tidak sehat, maka akan mulai partisan dan melakukan siaran-siaran yang mungkin banyak pelanggarannya atau kepentingan kelompok tertentu. Makanya, kita naikkan sedikit iklannya," papar politisi dari F-Golkar itu.

Sementara terkait batasan kepemilikan, lanjutnya, RUU penyiaran tidak terlalu banyak berubah dengan UU sebelumnya. "Kemarin



Wakil Ketua Baleg DPR RI Dossy Iskandar dan Firman Subagyo

sempat ada kritikan tidak ada pembatasan, itu tidak betul, karena disini juga mengatur dan kita adopsi dari UU yang lama," tandas Meutya. ■

(ann.mp). Foto: Jaka/hr.

BPKP Perwakilan Sumut Lakukan Pendampingan SAP Berbasis Akrual

Tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), Badan Keahlian DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, baru-baru ini. Kedatangan rombongan yang dipimpin Kepala Badan Keahlian DPR RI, K. Johnson Rajagukguk, diterima Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Mulyana.

Menurut Johnson, tujuan kunjungan ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan BPKP terhadap Pemda dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dan mengkaji implementasi SAP berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah



Kepala Badan Keahlian DPR RI K. Johnson Rajagukguk berdialog dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Mulyana

Daerah (LKPD) Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 serta persiapan basis akrual untuk LKPD TA. 2016.

Sementara Mulyana menjelaskan, bentuk pendampingan yang dilakukan BPKP Perwakilan Sumatera Utara kepada pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual tersebut, yaitu membantu Inspektorat dalam melakukan reviu atas LKPD, melakukan pelatihan, bimtek, sosialisasi, dan diklat, serta mengadakan *coaching clinic* kepada setiap SKPD dalam meningkatkan kapasitas SDM di daerah.

Sedangkan dalam membantu Pemda untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di provinsi Sumatera Utara, BPKP telah mengeluarkan aplikasi SIMDA terbaru yang sudah mendukung penerapan SAP berbasis akrual. Bahkan, SIMDA ini sudah bisa

menyesuaikan dengan perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh Permendagri. SIMDA yang dikeluarkan BPKP sudah bisa menghasilkan RAPBD yang nantinya akan dibahas dan disetujui oleh DPRD melalui menu *E-Planning*.

Dari 34 Pemda Kab/Kota, 30 Pemda Kab/Kota telah menggunakan SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. Selain itu, BPKP juga mengeluarkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) untuk membantu dalam mengelola keuangan desa. Dari 5.400 desa di Sumatera Utara, sekitar 800 desa yang sudah menerapkan SIMDA desa, hal ini dikarenakan masih belum adanya komitmen dari Bupati dalam mendorong perangkat desa untuk menerapkan aplikasi Siskeudes. Selain itu, sarana dan prasarana desa juga belum mendukung masuknya aplikasi Siskeudes ini. ■

(mp). Foto : dok/hr.

RUU Sisbuk Sebagai Jawaban Rendahnya Minat Baca Masyarakat Indonesia

Data *Most Littered Nation In the World* yang dilakukan oleh *Central Connecticut State University* pada Maret 2016 lalu, menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.



Pada hal, tingkat minat baca atau daya literasi suatu bangsa memberikan pengaruh yang besar dalam persaingan global antar bangsa. Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan (RUU Sisbuk) diharapkan menjadi jawaban atas rendahnya minat baca masyarakat Indonesia.

Demikian ditegaskan Ketua Panja RUU Sisbuk sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, saat Uji Publik RUU Sisbuk di Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Jawa Timur, Rabu (22/03). Hadir juga dalam acara ini sebagai pembicara kunci, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy.

"Melihat posisi Indonesia tersebut, kondisi daya literasi bangsa kita sungguh

memprihatinkan, tidak heran jika kita tidak dapat bersaing dengan bangsa-bangsa yang memiliki budaya literasi yang baik. RUU tentang Sistem Perbukuan yang kita susun bertujuan untuk menjawab salah satu permasalahan yang kita dihadapi terkait dengan rendahnya tingkat daya literasi masyarakat Indonesia," jelas Sutan.

Sutan menjelaskan, RUU yang terdiri dari 12 bab dan 72 pasal berdasar perkembangan terakhir RUU pada 9 Februari lalu, disusun berdasar filosofis, fisiologis, dan yuridis. Konsep dan arah kebijakan perbukuan dalam RUU ini akan menjawab permasalahan mengenai keterbatasan akses masyarakat terhadap buku yang bermutu, murah, dan merata.

Dalam kesempatan itu, Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengemukakan budaya membaca (perbukuan) dan literasi masyarakat Indonesia tertinggal empat tahun dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu, masalah perbukuan atau literasi tersebut sangat mendesak dan harus diluruskan dan harapannya RUU Sistem Perbukuan segera disahkan.

Menurut Muhadjir, RUU Sistem Perbukuan ini menjadi pertanda bangsa Indonesia telah menyadari pentingnya buku dan membaca untuk memperkokoh bangsa menuju Indonesia lebih baik. Ketertinggalan yang saat ini dialami bangsa Indonesia harus dikejar dengan RUU tersebut dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi seluruh wilayah di Indonesia. ■

(sf), Foto Sofyan/ht



Ketua Panja RUU Sisbuk Sutan Adil Hendra saat Kuncker ke Universitas Muhammadiyah Malang

Komisi II DPR RI Konsisten Perjuangkan Tuntutan Tenaga Honorer

Komisi II DPR RI pada hari ini, Kamis (16/03) menerima audiensi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang sejak pagi melakukan unjuk rasa di depan Gerbang Utama DPR RI, Senayan, Jakarta.

“ Audiensi PPNI ini diterima oleh Anggota Komisi II DPR RI yakni Arteria Dahlan dan Haerudin Amin. Kedua legislator tersebut menerima baik tuntutan yang disampaikan dan berjanji akan memperjuangkan aspirasi mereka.

Anggota DPR RI Fraksi PAN Haerudin mengatakan, Komisi II DPR RI akan memperjuangkan nasib para perawat honorer dalam kesempatan rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat. "Dalam waktu dekat Komisi II DPR RI akan melakukan rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Kami akan berjuang," ungkap Haerudin.

Selain itu, Haerudin juga meminta pengunjung rasa untuk mengawal proses itu. Ia juga mengatakan bahwa Komisi II DPR RI tidak akan mengkhianati apa yang telah dikatakan. "Silakan kawal. Kami tidak akan bohong atau khianat dengan apa yang kami sampaikan," tambahnya.

Semangat untuk memperjuangkan tenaga honorer juga disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan. Dirinya menjelaskan Komisi II DPR RI sudah membulatkan keputusan untuk memperjuangkan nasib para perawat honorer. "Komisi II DPR RI sudah dalam kesepakatan bulat untuk memperjuangkan nasib saudara-saudara," ujar Arteria.

Menurutnya, berbicara tentang kesehatan bukan hanya berbicara soal kompetensi, tapi berbicara juga tentang investasi. Sehingga



Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan

keberadaannya perlu diperhatikan secara serius. "Bicara tentang kesehatan bukan hanya bicara tentang kompetensi, bukan hanya soal apakah pintar atau tidak. Bicara kesehatan berarti bicara investasi. Sama dengan bicara tentang pembangunan jalan tol," ungkap Arteria.

Dia juga menambahkan, Komisi II DPR RI telah menurunkan tim ke daerah-daerah untuk menilai proses tes PNS. Komisi II DPR RI juga telah minta kepada Kementerian Dalam Negeri agar mengawal proses tes. "Kami sudah turunkan tim. Kita minta juga pada Kemendagri supaya bupati dan gubernur jangan main-main," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, selain PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia), kelompok yang menamakan diri sebagai Forkot PHI (Forum Komunikasi Perawat

Komisi II DPR RI sudah membulatkan keputusan untuk memperjuangkan nasib para perawat honorer

Honorer Indonesia) juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Unjuk rasa ini dimaksudkan untuk menyampaikan tuntutan mereka segera diangkat menjadi PNS. ■

(hs/sc) Foto: Jayadi/hr

Setjen DPR RI Wujudkan Museum Modern



Suasana Forum Group Discussion Permuseuman dengan tema "Registrasi, Database dan Dokumentasi Koleksi Museum"



Museum DPR RI akan menjadi Museum Modern yang memuat berbagai jenis barang-barang bersejarah mengenai perjalanan Parlemen Indonesia dari masa ke masa. Museum ini diharapkan menjadi wahana pengetahuan dan tempat belajar bagi generasi bangsa dalam mengetahui penyelenggaraan negara oleh wakil rakyat di DPR RI.

“ Kepala Bidang Arsip dan Museum Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Lili Trisnansih mempunyai misi menjadikan museum DPR RI menjadi yang modern, yang dapat mempresentasikan dan menggambarkan perpolitikan, demokrasi, dan pembangunan bangsa Indonesia.

"Museum DPR RI menjadi milik bangsa dan bisa mempresentasikan dan menggambarkan politik dan demokrasi bangsa Indonesia. Museum DPR RI perlu dikemas jadi Museum *Modern*," katanya, saat Forum *Group Discussion* (FGD) Permuseuman dengan tema "Registrasi, *Database* dan Dokumentasi Koleksi Museum", di Gedung Nusantara I DPR RI, Kamis (16/03).

Lili Trisnansih mengatakan, dalam mewujudkan Museum DPR RI yang modern, selain dukungan sumber daya manusia (SDM), juga diperlukan dukungan Pimpinan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan Setjen DPR RI. "Untuk peningkatan dan pengembangan Museum DPR RI ini perlu dukungan SDM dan dukungan dari pihak Pimpinan Sekretariat Jenderal, Pimpinan Dewan, dan BURT baik secara dukungan politis, rencana strategis, maupun anggaran," jelasnya.

Menurut Lili, yang masih jadi kendala yang dihadapi Museum DPR RI adalah masih terbatasnya ruang museum dan kurangnya SDM. "Ruang yang terbatas membuat banyak koleksi museum yang tidak dapat ditampilkan, dan jumlah SDM dan kualitas serta jumlah SDM perlu ditingkatkan," tekan dia.

Kepala Bidang Registrasi dan Dokumentasi Museum Nasional Ita Yulita sebagai narasumber FGD, menilai Museum DPR RI termasuk museum sejarah yang biasa dikembangkan. Dengan demikian pengunjung berantusias untuk melihat dan belajar mengenai Lembaga Perwakilan Rakyat.



"Keberadaan museum DPR RI saya sendiri melihat bagus, apalagi Museum DPR RI termasuk museum sejarah, dimana pengunjung dapat melihat bagaimana perkembangan parlemen di Indonesia dari masa ke masa," ungkapnya.

Lebih Lanjut, Ita Yulita menekankan museum DPR RI ini harus dikemas agar dapat lebih menarik dengan melakukan pengelolaan museum dengan lebih baik dan mencari benda-benda yang memenuhi syarat sebagai koleksi museum DPR RI," tegasnya. ■

(as) Foto: Jaka/hr.

BPJS Ketenagakerjaan Diminta Buat Simulasi Program JHT

BPJS Ketenagakerjaan diminta membuat simulasi program Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai dengan ketentuan hak-hak normatif yang diterima oleh pekerja yang di PHK sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.



Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri saat membacakan salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat umum dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Ketenagakerjaan dan Dewan Pengawas di Gedung ruang rapat komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/02).

Selanjutnya Syamsul, terkait transformasi program jaminan pensiun dari PT TASPEN dan PT ABSABRI ke BPJS Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI akan mengadakan rapat dengan *stakeholder* terkait.

"Kita akan panggil Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, OJK, PT ASABRI, PT TASPEN dan BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas ini karena tidak boleh ada badan yang mengelola ini selain BPJS Ketenagakerjaan," ujar politisi F-



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri

Golkar.

Selain itu, Komisi IX DPR RI juga mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri agar

seluruh Pemerintah Daerah memiliki komitmen dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja yang aktif dan honorer.

"Kita minta B P J S Ketenagakerjaan meningkatkan pelayanan kepesertaan kepada perusahaan swasta dan

melaksanakan rekomendasi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan terhadap penyelenggaraan jaminan sosial," pungkasnya. ■

(ria.mp)/foto:arif/hr

Pilih Dewas LPP TVRI Komisi I DPR RI Akan Himpun Masukan Masyarakat



Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari

Komisi I DPR RI dalam waktu dekat akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap sebelas nama yang diusulkan Presiden untuk dipilih menjadi Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) periode 2017-2021. Namun, sebelumnya Komisi I DPR RI akan terlebih dahulu menghimpun masukan masyarakat terhadap para calon tersebut agar hasilnya sesuai yang dikehendaki oleh masyarakat.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almashyari mengatakan, saat ini sedang dalam proses pengumuman di surat kabar agar mendapat masukan dari masyarakat luas. "Sudah, akan segera di proses. Sekarang sedang proses pengumuman di surat kabar agar mendapat masukan dari masyarakat luas," tutur Abdul Kharis saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu, (22/03).

Uji kelayakan dan kepatutan Dewas LPP TVRI ini diperkirakan akan berlangsung

pada minggu kedua pada bulan April, untuk sementara menunggu selesainya masukan dari masyarakat. "fit and proper test sekitar minggu kedua bulan april. Tanggalnya masih menunggu selesainya masukan dari masyarakat," jelasnya.

Sebagai televisi yang dimiliki oleh negara, LPP TVRI memiliki tantangan yang cukup besar di tengah persaingan televisi swasta. Oleh karenanya, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan penting bagi Komisi I dalam memilih enam calon dari sebelas nama yang diajukan

Presiden. Partisipasi masyarakat dalam memberi masukan ke Komisi I diharapkan akan membawa LPP TVRI menjadi lebih baik.

Adapun sebelas nama calon Dewas LPP TVRI yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I adalah Adam Bachtiar, Antar MT Sianturi, Arief Hidayat Thamrin, Dudi Hendrakusuma Syahlani, Eddy Kurnia, Edi Winarto, Made Ayu Dwie Mahenny, Maryuni Kabul Budiono, Pamungkas Trishadiatmoko, Supra Wimbarti dan Yazirwan Uyun. ■

(fhs.mpj/fotojaka/hr)

Rajin Belajar Adalah Kontribusi Awal Para Siswa untuk Negara

Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menerima Siswa-siswi SMP Sekolah Islam Terpadu Al Ummah Sukabumi. Dalam kunjungannya para siswa diberikan pemahaman tentang fungsi dan tugas kenegaraan lembaga legislatif. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, para generasi bangsa harus mampu memberikan kontribusi terbaik untuk negara.

Mengabdikan pada negara bisa melalui berbagai macam cara, bisa dengan jalur pemerintahan, atau non pemerintahan. Pada intinya warga negara seyogyanya mampu memberikan manfaat bagi warga negara lain. Untuk mencapai semua itu, Reni menegaskan kepada para siswa agar rajin belajar sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Satu-satunya kunci adalah rajin belajar," paparnya di hadapan para siswa di ruang KK 1, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/03).



Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati bersama siswa SMPIT Al Ummah

Dalam paparannya, Anggota Dewan dari Dapil Jawa Barat IV ini juga memberikan penjelasan tentang sejarah DPR RI yang dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta. Tanggal peresmian KNIP 29 Agustus

1945 dijadikan sebagai tanggal dan hari lahir DPR RI.

Reni juga menjelaskan kepada para siswa, anggota DPR RI dipilih langsung oleh rakyat lima tahun sekali. Adapun fungsi DPR RI meliputi pada fungsi legislasi, berkaitan dengan menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU). Fungsi

anggaran, berkenaan dengan memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden, serta memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama.

Berkenaan dengan fungsi pengawasan, DPR RI memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD RI, terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama. ■

(eko/sc) Foto: Mulya/hr

Koperasi Setjen dan BK DPR RI Raih Wajar Tanpa Pengecualian

Pelaksana Harian (Lakhar) Sekjen DPR RI selaku dewan Pembina Koperasi Pegawai Sekjen dan BKD DPR RI, Damayanti mengapresiasi keberhasilan Koperasi tersebut dalam meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari kantor akuntan publik.

“ Hal tersebut diungkapkannya dalam sambutan pembukaannya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Ke-31 Koperasi Sekjen dan BKD DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (17/03).

"Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu tiga puluh satu tahun Koperasi Pegawai Sekjen dan BKD DPR RI dalam meraih predikat WTP untuk pengelolaan Koperasi dari kantor akuntan publik. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut," ujar Damayanti.

Dilanjutkan Maya, begitu ia biasa disapa, keberhasilan dari sebuah koperasi tentu tidak hanya berhenti pada predikat itu saja. Melainkan juga meningkatkan partisipasi anggotanya untuk lebih mandiri, serta dapat memberikan nilai manfaat yang lebih dari kesertaannya pada koperasi. Pada akhirnya juga akan bisa meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

"Disini contohnya saya lihat, adanya berbagai peningkatan fasilitas-fasilitas yang sudah dilakukan Koperasi ini, sebut saja dalam bidang perdagangan dengan perubahan bentuk menjadi Toserba (toko serba ada) dan berbagai hal lainnya,"pungkasnya.

Sementara itu Ketua Koperasi,



Dewan Pembina Koperasi Pegawai Sekjen dan BKD DPR RI, Damayanti menerima kartu

**Ketua Koperasi,
Mochammad Djazuli
mengatakan bahwa
keberhasilannya meraih
WTP tersebut berkat
partisipasi dari seluruh
anggota Koperasi
Sekjen dan BKD DPR RI.**

Mochammad Djazuli mengatakan bahwa keberhasilannya meraih WTP tersebut berkat partisipasi dari seluruh anggota Koperasi Sekjen dan BKD DPR RI. Namun, ia meyakini semua itu tidak akan berarti tanpa adanya peningkatan nilai manfaat yang diterima oleh para anggota Koperasi.

Terkait hal itu ia menjelaskan bahwa berbagai peningkatan yang diterima anggota Koperasi tersebut dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini, yakni peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) dari sebelumnya 3,089 persen pada tahun 2015 menjadi 3,128 persen di tahun 2016 kemarin. Tidak hanya itu, tabungan hari tua para anggota pun meningkat dari 300 ribu

rupiah menjadi 700 ribu rupiah per orang. Asuransi kesehatan untuk para anggota Koperasi pun dinaikkan standardnya.

"Yang tidak kalah penting dari semua itu adalah akuntabilitas, dan keterbukaan. Disini seluruh anggota Koperasi dapat melihat langsung penggunaan anggaran Koperasi yang kami share di portal masing-masing. Dan Alhamdulillah sudah ada peningkatan pelayanan dalam Unit Simpan Pinjam (USP). Jika sebelumnya harus menunggu tiga bulan. Alhamdulillah karena ada kenaikan modal, maka tidak sampai dua hari juga bisa dicairkan. Bahkan untuk sakit dan pendidikan satu hari juga bisa selesai,"papar Djazuli.

Baik Maya maupun Djazuli mengamini usulan yang diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DKI

Kalau dihapuskan dari pajak mungkin belum bisa, tapi kami berharap pajak untuk koperasi bisa diturunkan

Jakarta, Hasanudin terkait penghapusan pajak koperasi. Keduanya menilai Koperasi berbeda dari unit usaha lain yang lebih mengutamakan profit. Dikatakan Djazuli, koperasi malah lebih mengutamakan benefit dibanding profit.

"Kalau dihapuskan dari pajak mungkin belum bisa, tapi kami berharap pajak untuk koperasi bisa diturunkan,"pungkasnya.

Sebagaimana RAT tahun-tahun sebelumnya, pada RAT kali ini, Koperasi Pegawai Sekjen dan BKD DPR RI juga menyediakan sejumlah *doorprize*, diantaranya perjalanan umrah untuk 6 orang, *Voucher* belanja untuk beberapa orang, serta yang berbeda untuk tahun ini adalah adanya satu unit motor yang diundi dan bisa dimiliki oleh anggota Koperasi Pegawai Sekjen dan BK DPR RI. ■

(Ayuj) Foto: Mujya/hr.

Pansus DPR RI Beri Ruang Perlindungan Bagi Korban Terorisme

Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Risa Mariska menyampaikan keinginan pansus untuk memberikan perlindungan kepada korban terorisme melalui revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.



Anggota Panitia Khusus Terorisme Risa Mariska

“ Kita minta semakin dikuatkanlah, di usulan pemerintah tidak ada, makanya kita usulkan perlindungan kepada korban untuk dimasukkan,” tutur Risa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/03).

Ia menjelaskan, saat ini pansus bersama pemerintah belum membahas hal-hal yang bersifat substantif. Namun, lanjut Risa, pansus melihat ada urgensi terkait perlindungan terhadap korban.

Menurut politisi F-PPD itu, negara belum hadir dalam memberikan perlindungan terhadap korban terorisme. Penanganan tindak pidana terorisme selama ini hanya difokuskan kepada pelaku. Sementara, hak-hak korban seringkali terlupakan.

Data di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan korban peristiwa bom Bali I, bim Bali II, JW Marriot, Kedutaan Australia, dan yang terakhir bom Sarinah belum

mendapatkan kompensasi dengan baik.

Selain memperjuangkan pemenuhan hak korban, Pansus juga mengusulkan agar nama-nama yang sebelumnya terduga pelaku namun tidak terbukti untuk diperbaiki, sehingga mereka bisa kembali diterima masyarakat.

Beberapa poin yang urgen lainnya yaitu terkait masa waktu penindakan, yang sebelumnya 7 hari diatur menjadi 30 hari. Bercermin pada kasus Siyono, hal ini menjadi penting dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM terhadap pelaku terduga teroris.

"Tujuh hari itu biasanya aparat punya keterbatasan waktu, kalau kita berikan jangka waktu yang lebih lama mereka bisa fleksibel. Kadang kita dengar ada penyiksaan terhadap pelaku, nah kita berharap bisa mengurangi kemungkinan seperti itu," ia menandaskan. ■

(ann.mpi)/fotomulya/hr



sumber : www.detik.co

Komisi VII DPR RI Berkunjung ke Parlemen Inggris

Tim Komisi VII DPR RI baru saja melakukan kunjungan kerja ke Inggris. Di Inggris Tim Komisi VII DPR RI berkunjung ke DPR Inggris (*UK House of Commons*) dan sejumlah lembaga/instansi lainnya yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi VII DPR RI.

“ Di DPR RI Inggris, kami membahas kerjasama parlemen dan juga pemerintahan,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W. Yudha, Minggu (19/03).

Menurut Satya, yang menjadi Ketua Tim Kunjungan Kerja tersebut, Tim Komisi VII DPR RI diterima di Komisi Parlemen Inggris yang membidangi bisnis, energi dan strategi industri (*Select Committee on Business, Energy and Industrial Strategy*). Parlemen Inggris telah menyesuaikan nama Komisi yang membahas energi ini lantaran Pemerintahan Inggris juga telah mengubah nama kementeriannya.

Tim Komisi VII DPR RI diterima langsung oleh Ketua Komite Amanda Milling, anggota *UK House of Commons* dari Partai Konservatif. Pokok-pokok masalah yang dibahas dalam pertemuan kedua komisi energi dari dua negara ini di antaranya adalah tentang strategi Inggris dalam pengembangan energi khususnya di bidang energi baru dan terbarukan (EBT), dan penanggulangan perubahan iklim.

Di Inggris, Komisi VII DPR RI juga berkunjung ke Kementerian Energi dan Strategi Industri untuk mendapatkan gambaran tentang kerjasama energi antara Inggris dan Indonesia, yang dikenal dengan *UK-Indonesia Energy Dialogue*. Mereka mendapatkan gambaran model pengawasan di sektor ketenagalistrikan yang dilakukan oleh lembaga Ofgem, otoritas netral yang mengawasi ketenagalistrikan, yang kemudian melapor kepada parlemen.

Selama kunjungan hampir sepekan tersebut, yang berlangsung pekan lalu, rombongan Komisi VII DPR RI juga sempat mendatangi kantor pusat BP Pic dan *Premier Oil*. Kedua korporasi ini telah lama berinvestasi



Komisi VII DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya W. Yudha berdiskusi dengan Komisi Parlemen Inggris

di bidang minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.

"Kami berdiskusi dengan BP dalam penyajiannya tentang tantangan energi ke depan yang terangkum dalam BP *Statistical Review* yang dipresentasikan oleh BP *Chief Economist - Spencer Dale*," ujar Satya.

Di BP, rombongan Komisi VII DPR RI diterima langsung oleh Deputi CEO Dave Sanyan.

Sedangkan ketika berkunjung ke kantor *Premier Oil*, penyambutan dipimpin CEO *Premier Oil* Tonny Durrant. Kedua pihak membahas tentang strategi pengembangan gas di Natuna yang terhubung dengan Vietnam.

Rombongan

Komisi VII DPR RI juga berdiskusi tentang aturan perminyakan dan pertambangan dengan lembaga riset *National Governance Resources Institute* (NRGI). Diskusi juga dilakukan dengan *Climate Parliament*, Inggris.

"Mengakhiri kunjungan kami bertatap muka dengan Duta Besar Indonesia Rizal Sukma yang mengirim senior stafnya dalam mendampingi selama kunjungan kami," ujar Satya.

Anggota rombongan Komisi VII DPR RI terdiri dari Hadi Mulyadi (Fraksi PKS), Ahmad Fariq (Fraksi PPP), Doni Oekon (Fraksi PDIP), Kurtubi (Fraksi Partai Nasdem), Zulkiflimansyah (Fraksi PKS), Aryo Djojohadikusumo (Fraksi Partai Gerindra), Farid al-Fauzi (Fraksi Partai Hanura), Agus Sulistyono (Fraksi PKB), Eni Maulani Saragih (Fraksi Partai Golkar), dan Mohammad Nazir (Fraksi Partai Demokrat). Ketika mengunjungi Parlemen Inggris, ada tambahan anggota rombongan dari anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. ■

(es). Foto : Dok/itr

Pendidikan Vokasi Dukung Pertumbuhan Industri Nasional

Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI menyoroti soal pendidikan vokasi, hal ini menjadi perhatian guna mendukung peningkatan kualitas SDM industri nasional. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Rapat dipimpin Ketua Komisi VI Teguh Juwarno di ruang rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta.

Komisi X DPR RI Perjuangkan Dana Wali Amanah Kebudayaan

Komisi X DPR RI sedang memperjuangkan dana wali amanah kebudayaan sebagai sumber pendanaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan yang sedang dibahas DPR RI bersama pemerintah.



Ketua Tim Kunjungan Spesifik Panja RUU Kebudayaan, Ferdiansyah

“ Kami sedang memperjuangkan dana wali amanah kebudayaan dalam RUU

Kebudayaan,” kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Panja RUU Kebudayaan Ferdiansyah

saat uji publik RUU tersebut di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Kamis (22/03).

Bentuk dana wali amanah kebudayaan tersebut, lanjut legislator dari Fraksi Golkar ini, bisa berbentuk dana abadi, dana bergulir atau dana menurun, yang nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Tujuannya adalah agar kebudayaan dari sisi pendanaan ada support maupun kepastian. “Hal ini sekaligus juga menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebudayaan,” tegasnya di acara yang dihadiri para pemangku kebudayaan di Bali tersebut.

Turut serta Anggota Komisi X DPR RI dalam uji publik RUU Kebudayaan tersebut antara lain Wayan Koster, Wiryanti Sukamdani, Sofyan Tan, Irine Yusiana Roba Putri, Bambang Sutrisno, Mujib Rohmat, Nuroji Benna Melinda, Amran, dan Arzeti Bilbina. ■

@yosi / Foto : Jayadhr

Teguh meminta rincian konsep dan penjelasan dari Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta bagaimana skema kerja sama dengan Kementerian Pendidikan atau Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Tidak hanya pimpinan komisi yang memberikan perhatian, Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Sartono juga serius mendukung pendidikan vokasi.

“Kita fokus pada kegiatan industri yang kita kuasai dengan pendidikan vokasi,” ujar Sartono, di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senin (20/03).

Dia juga mengatakan, pendidikan kejuruan harus mendapat perhatian, karena dari sini bisa mencetak tenaga kerja taktis sesuai kebutuhan industri. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menyarankan agar pola kurikulum dalam sekolah kejuruan

melibatkan pelaku usaha dan pelaku industri agar silabus pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Airlangga pendidikan vokasi menjadi kegiatan kementerian yang menjadi prioritas, namun belum mendapat alokasi anggaran. Dia berharap ke depan bisa mendapat perhatian dan dapat direalisasikan secara serius oleh para pemangku kepentingan.

Rapat kerja ini juga membahas kinerja Kementerian Perindustrian selama tahun 2016 dan juga rencana kerja di tahun 2017. Selain itu Komisi VI DPR RI juga mengevaluasi pelaksanaan APBN 2016 di kementerian tersebut. ■

(e)ncocj/fotomulya/hr



Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno

UU Jasa Konstruksi Prioritaskan Konstruksi Nasional

DPR RI dan Pemerintah sepakat, melalui Undang-Undang Jasa Konstruksi (UU JK) akan berusaha menjadikan jasa konstruksi khususnya di sistem transportasi terpadu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sebab, ruh konstruksi itu ada di transportasi. Sehingga dengan RUU JK ini bagaimana menghasilkan konstruksi yang baik, kuat, dan dikerjakan oleh warga negara Indonesia sendiri.

“ Jadi, dengan UU JK ini kita akan menjadikan konstruksi menjadi tuan rumah di Indonesia. Misalnya dikerjakan orang Indonesia, perusahaan dan karyawannya orang Indonesia, tanggung jawab pemeliharannya dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota dan sebagainya,” tegas Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis dalam forum legislasi 'Implementasi UU Jasa Konstruksi - Senadakah dengan Nawacita Jokowi?' bersama Direktur Bina



Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis dalam Diskusi Forum Legislasi DPR RI

Investasi Infrastruktur, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yaya Supriyatna Sumadinata, dan Ichsanudin Noorsy pakar ekonomi politik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/03).

Tapi, kata politisi Gerindra itu, kalau sementara ini infrastruktur dikerjakan oleh perusahaan asing, maka tenaga kerjanya harus lebih banyak orang Indonesia. Dengan begitu, maka akan terjadi transfer pengalaman - pengetahuan kerja (transfer knowledge) agar kita tidak terus tergantung kepada asing.

Karena itu DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan sosialisasi UU No.2 tahun 2017 ini. Mengingat makin tingginya persaingan jasa konstruksi di tingkat nasional dan internasional, maka dibutuhkan payung hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang jasa konstruksi terutama perlindungan bagi pengguna jasa. "Kalau ada pelanggaran oleh pengguna jasa atau penyedia jasa, maka proses pemeriksaan hukum dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan jasa konstruksi itu

sendiri," ujarnya.

Secara keseluruhan menurut Djemy, UU JK ini telah mendapat persetujuan seluruh fraksi DPR RI dan pemerintah pada 7 Desember 2016 lalu.

"Pembinaan konstruksi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi masyarakat," pungkasnya.

Direktur Bina Investasi Infrastruktur, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yaya Supriyatna Sumadinata mengatakan bagaimana UU ini memberikan bekal agar hasil konstruksi yang baik dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena itu tanggung jawab pemeliharannya dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota.

Tapi, menurut Noorsy kita

akan menghadapi tantangan dari dalam dan luar negeri karena masih terjadi ketimpangan struktural regional maupun internasional. Disamping itu ketergantungan impor terhadap makanan, energi, dan keuangan.

Masalahnya dengan jasa konstruksi ini kata Noorsy, konstruksi kita punya daya saing dengan dunia tidak? Setidaknya ada 5 negara yang akan menjadi pesaing jasa konstruksi tersebut. Yaitu, Jepang (pendekte transportasi Indonesia), Korea, India, China dan Singapura. "Kalau uang

yang kita pakai untuk pembangunan konstruksi itu dari APBN hasil utang ke asing, maka UU JK ini tak akan menyelesaikan ketimpangan transportasi," pungkasnya. ■

(s.c) Foto : Azka/hr.

Perawat Honorer Tuntut Jadi PNS

Komisi IX DPR RI melakukan audiensi dengan Forum Komunikasi Perawat Honorer Indonesia (FORKOM PHI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/03).

Ketua BKSAP Terima Kunjungan Dubes Azerbaijan

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf menerima kunjungan Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Tamerlan Qarayev di ruang kerjanya di Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Selasa (21/03).

“Kedatangan Dubes Azerbaijan kali ini pertama untuk mengucapkan rasa terimakasih atas kerjasama BKSAP DPR RI dengan Azerbaijan yang telah terjalin selama ini. Juga termasuk pemutaran film Karabah di DPR RI beberapa waktu lalu. Karena sebagai *President of International Humanitarian law* itu menjadi tanggung jawab saya. Banyak sekali *review* ji Azerbaijan mengenai pendudukan Armenia di Karabah,” ujar Nurhayati.



Ketua BKSAP, Nurhayati Ali Assegaf bersama Dubes Azerbaijan

Dilanjutkannya, selain itu Dubes Azerbaijan juga mengundang Nurhayati untuk hadir menjadi pembicara di salah satu forum internasional yang akan digelar di ibukota negara tersebut pada bulan Mei mendatang. Hal tersebut semata dalam rangka menjalankan

fungsi diplomasi parlemen, selain itu juga untuk mendukung kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia.

“Aktifnya peran DPR RI khususnya

BKSAP dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemen ini ditandai dengan menjadi pembicara utama di berbagai forum internasional seperti forum Uni Eropa beberapa waktu lalu, dan mendatang juga akan menjadi pembicara utama di ajang *Global Economic Summit*. Ini semua merupakan kepercayaan dari dunia terhadap Parlemen Indonesia,” ujarnya.

Nurhayati mengaku bahwa kepercayaan terhadap parlemen Indonesia dari dunia itu sejatinya merupakan kerja keras dari seluruh pihak yang ada di

gedung Parlemen ini. Kerja keras dan cerdas serta ikhlas diyakini Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini. “Tiada keberhasilan tanpa kerjasama,” pungkasnya. ■

(Ayu), Foto: Rumi/hr.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi selaku pimpinan rapat menjelaskan, kedatangan FORKOM PHI dan PPNI meminta untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka juga berharap pemberian upah yang layak bagi perawat serta penghapusan sistem Tenaga Kerja Sukarela (TKS) oleh pemerintah.

“Hak-hak normatif seperti gaji, perlindungan dan penggolongan sesuai kompetensi bisa kita dorong untuk diperjuangkan. Namun kalau masalah CPNS itu bukan domain kami, ini akan kami serahkan kepada Komisi II DPR RI,” jelas Dede.

Terkait tenaga kerja sukarela, atau bekerja tetapi tidak dibayar, Dede mengatakan Komisi IX DPR RI akan memanggil Kementerian Kesehatan untuk dimintai keterangan akan rasio kebutuhan perawat, supaya *demand and supply* terjaga. “Jangan sampai lulusan perawat setiap tahun bertambah terus, tetapi *user* tidak membutuhkan sehingga terjadi

penumpukan. Akhirnya dibuat konsep sukarelawan, disuruh kerja tapi tidak dibayar,” tuturnya.

Terkait permasalahan biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa perawat yang ingin melaksanakan magang, menurut politisi partai Demokrat hal itu perlu segera ditindak dan dilaporkan. “Seharusnya di zaman sekarang hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, tentu kita akan minta itu ditindak dan dilaporkan,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam yang mengatakan terkait permasalahan pengangkatan CPNS dan gaji dibawah UMR, pihaknya akan mengundang Menteri Kesehatan, Menpan RB, Mendagri dan Menteri Keuangan agar bisa ketemu jalan keluarnya.

“Mereka sudah bekerja sebagai tenaga sukarela selama 10 sampai 15 tahun namun



Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi terima Forkom PHI dan PPNI

setiap ada pengangkatan PNS mereka gagal, karena kalah dengan anak-anak yang baru lulus. Oleh sebab itu mereka datang menuntut untuk diangkat menjadi PNS, sebab mereka menerima gaji masih dibawah UMR. Maka kami sepakat akan mengundang pihak terkait untuk membicarakan ini, agar ada jalan keluarnya,” pungkasnya. ■

(mp.pw) Foto: Iqbal/hr.

Pimpinan DPR RI Lantik Sekjen Baru

Ketua DPR RI Setya Novanto berharap Sekjen DPR RI yang baru saja dilantik mampu menjalankan amanat dewan. Hal tersebut diungkapkannya sesaat setelah melantik Sekjen DPR RI, Achmad Djuned Di ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Kamis (23/03).



Ketua DPR RI, Setya Novanto melantik Achmad Djuned sebagai Sekjen DPR RI

“Keberadaan Setjen DPR sebagai *supporting system* memiliki posisi yang strategis di tengah meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kinerja DPR RI. Dukungan layanan yang berkualitas sangat diperlukan agar pelaksanaan fungsi-fungsi dewan dapat maksimal, baik fungsi legislasi, pengawasan maupun anggaran. Termasuk dalam memperjuangkan aspirasi dan harapan masyarakat,” ujar Novanto.

Dewan, lanjut Politisi dari Fraksi Golkar ini berharap agar Sekjen dapat terus meningkatkan layanan persidangan pada DPR RI. Khusus kepada Sekjen yang baru

dilantik Dewan juga mengamanatkan untuk meningkatkan kinerja Sekjen dalam memberikan dukungan pelayanan secara profesional. Dewan tidak hanya memerlukan ketepatan namun juga kecepatan layanan.

Sementara itu Sekjen DPR RI, Ahmad Djuned meyakini dengan sinergitas antara Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, pihaknya mampu menjalankan amanat Ketua DPR tersebut.

“Berkaitan dengan pelayanan persidangan menyangkut beberapa aspek, yakni sinergitas antara Badan Keahlian dan Setjen DPR RI. Karena pelayanan persidangan menyangkut aspek substansi

yang ada di BK, aspek sarana dan prasarana ada di Setjen serta aspek teknis. Dengan sinergitas tersebut saya yakin sebagai *supporting system* kita mampu mewujudkan DPR RI sebagai Lembaga representasi rakyat yang modern, kredibel dan dapat dipercaya,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut hadir beberapa pimpinan DPR RI, Sekjen MPR RI Ma'roef Cahyono, Sekjen MK, M. Guntur Hamzah sebagai saksi. Serta hadir pimpinan BURT DPR RI, Roem kono, Agung Budi Santoso, beberapa Anggota DPR RI serta pejabat dan para staf di lingkungan Setjen DPR RI. ■

(ayu)/foto: Arief/hr



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi sejumlah Anggota DPR RI menerima kunjungan Dubes Maroko. Kamis (23/3). Foto: Jaka.

Ketua DPR RI Setya Novanto memimpin prosesi pelantikan Ahmad Djuned sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI di Pustakaloka Nusantara IV. Kamis (23/3). Foto: Arief,Runi



Jajaran PKAKN bertemu dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, membahas SAP berbasis Akrual, Medan (17/03).



Selamat Atas Dilantiknya

Achmad Djuned, SH., M.Hum

———— sebagai ————

Sekretaris Jenderal DPR RI

*“Semoga Amanah dalam
Melaksanakan Tugas”*

